

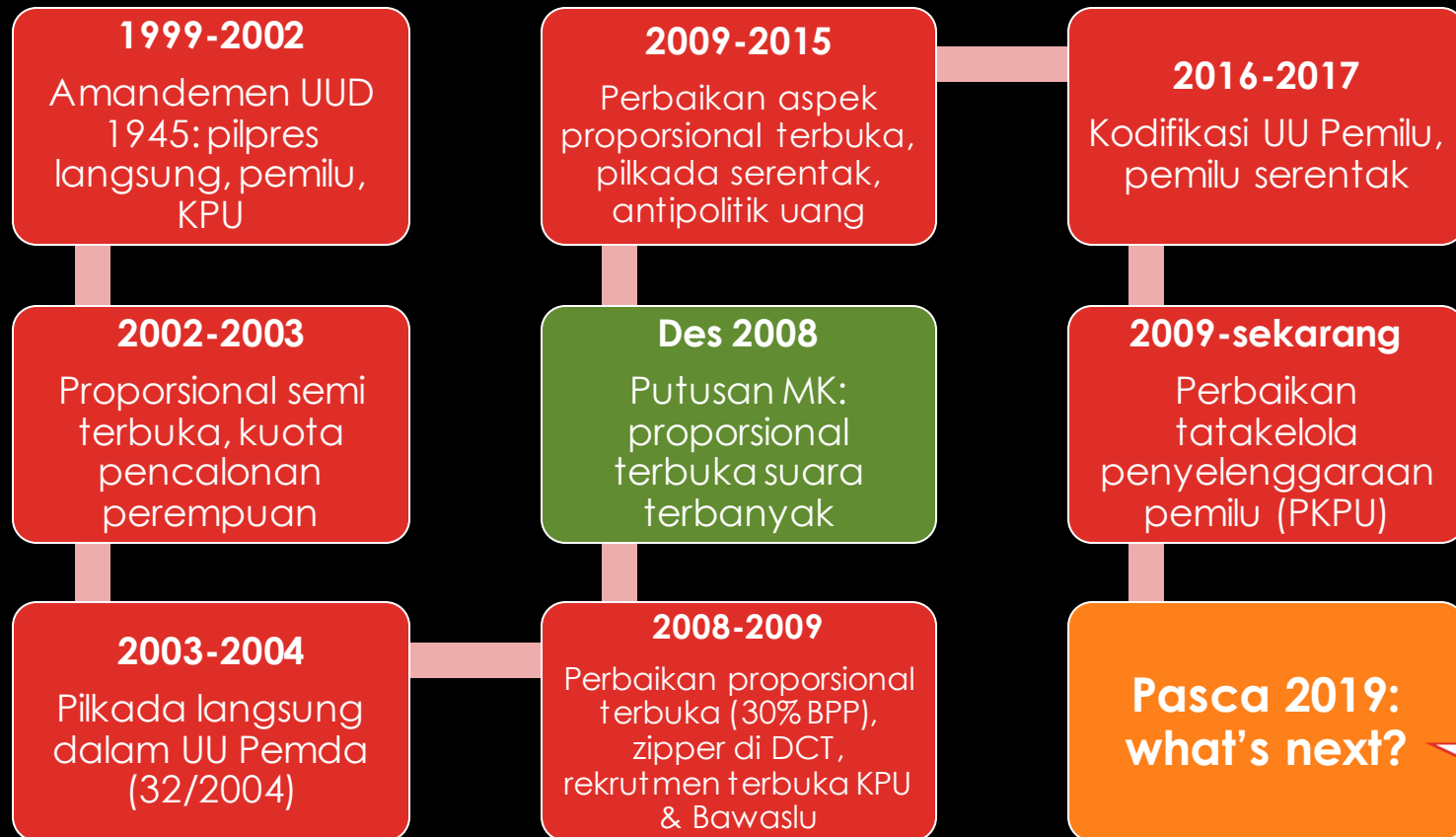
ADVOKASI MASYARAKAT SIPIL DALAM ISU KEPEMILUAN: *WHAT'S NEXT?*

Sri Budi Eko Wardani
[Departemen Ilmu Politik FISIP UI]

Diskusi Virtual Perludem dalam Rangka Pergantian Pengurus Perludem
20 Agustus 2020

MILESTONE ADVOKASI PEMILU ERA REFORMASI

Merekam jejak Advokasi masyarakat sipil dalam reformasi elektoral di Indonesia pasca Orde Baru.



Masyarakat sipil berkontribusi signifikan dalam reformasi elektoral, baik dalam pembentukan regulasi, pemantauan pemilu, dan pendidikan politik pemilih.

DARI KONFRONTATIF KE *CRITICAL ENGAGEMENT*, LALU KEMANA?

Strategi advokasi masyarakat sipil mendorong reformasi elektoral melalui perubahan **regulasi yang berhadapan langsung dengan jantung kekuasaan politik, yaitu SUMBER DAYA & RELASI KUASA POLITIK.**

Selama reformasi, **advokasi isu kepemiluan sangat dinamis**, beradaptasi dengan konfigurasi kekuatan politik tiap pemilu, perubahan isu regulasi yang bergerak cepat, dan pilihan strategi yang diambil secara individual oleh kelompok/lembaga dalam mencapai tujuan perbaikan sistem pemilu beserta aspek-aspeknya.

1999-2004:
Konfrontatif

2004- ...
Go Politics!

2009 -
Critical engagement

Strategi ke depan?

Refleksi kritis:
Capaian advokasi berbenturan dengan kepentingan elektoral partai politik.

APAKAH REFORMASI ELEKTORAL AKAN BERLANJUT?

IDENTIFIKASI TANTANGAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT SIPIL

- **GAGASAN**. Perdebatan sistem pemilu proporsional yaitu tarik menarik antara kepentingan penyederhanaan sistem politik (termasuk sistem pemilu), dan perbaikan representasi politik. Perdebatan terjadi di kalangan masyarakat sipil dan pengambil kebijakan.
- **AGENDA SETTING**. Kepemimpinan dalam mengarahkan agenda setting perubahan regulasi 'dikuasai' oleh elite politik (baca: DPR dan Pemerintah).
- **STRATEGI ADVOKASI**. Ada 'kebuntuan' strategi advokasi yang efektif memengaruhi proses perumusan kebijakan. Apakah konfrontatif atau engagement?
- **JARINGAN**. Perluasan jaringan membutuhkan *linkage* antara isu pemilu dengan gerakan demokratisasi dan HAM, namun perluasan jaringan terbentur masalah menerjemahkan isu teknis kepemiluan dengan agenda besar demokratisasi. Jaringan pemilu dianggap elitis dan spesifik.
- **ROADMAP**. Advokasi reformasi elektoral membutuhkan *roadmap* (peta jalan) sebagai agenda gerakan masyarakat sipil isu kepemiluan dalam jangka waktu tertentu (5 tahun).





MASA DEPAN REFORMASI ELEKTORAL: PERJUANGAN MELAWAN 'TEMBOK' PARTAI POLITIK

- **Jeffrey Winters:** Indonesia berada dalam kondisi “**oligarki-elektoral**”. Dari pemilu ke pemilu hanya memperlihatkan kepentingan partai politik untuk bertahan dalam siklus elektoral, dan kepentingan modal dalam distribusi sumber daya (kebijakan, anggaran, koneksi).
- Di sisi lain ada gejala melemahnya pengorganisasian gerakan masyarakat sipil menghadapi konsolidasi elite politik (oligarki-demokratik menurut Hee Yeon Cho).

Kondisi tersebut berpengaruh pada masa depan reformasi elektoral yang diperjuangkan masyarakat sipil. Bagaimana menghadapi kondisi tersebut? **Sedidaknya ada 3 cara:**

1. BAWAH: Partisipasi politik warga (demokrasi partisipatif)
2. ATAS: Reformasi partai politik melalui intervensi regulasi partai politik yang diusung gerakan masyarakat sipil.
3. KULTUR OPOSISI GERAKAN SIPIL dalam berhadapan dengan kekuatan oligarki politik-ekonomi, dan menggerakkan demokratisasi secara kontinu.

WHAT'S NEXT? MASYARAKAT SIPIL MEREBut AGENDA REFORMASI ELEKTORAL

- ✓ Susun Roadmap Reformasi Elektoral 2020– 2025 dengan target pencapaian yang terukur, dan menjadi alat/instrumen bersama dalam mencapai tujuan advokasi.
- ✓ Perkuat jaringan kepemiluan yang lintas isu, sinergi jaringan di tingkat lokal, dan membangun simpul-simpul jaringan dengan dunia kampus dalam memproduksi pengetahuan untuk mendukung advokasi.
- ✓ Memperjelas posisi *critical engagement* dengan partai politik, pemerintah, dan lembaga penyelenggara pemilu dalam advokasi agenda reformasi elektoral sesuai roadmap.



dan masih banyak lagi.....

“ PEMBAJAKAN KEDUA TELAH MEMBUAT DEMOKRASI ELEKTORAL SEPENUHNYA BERUBAH FUNGSI MENJADI INSTRUMEN UNTUK MERAH, MEMBANGUN, DAN MENEGAKKAN PLUTOKRASI KEKUASAAN YANG DIKENDALIKAN OLEH SANGAT SEDIKIT ELITE YANG MENDOMINASI SUMBER DAYA POLITIK DAN EKONOMI ”

Usman Hamid & Darmawan Triwibowo (editor), *Jejak Perjalanan dan Pemikiran A.E. Priyono: Menolak Matinya Intelektualisme*, Mizan: 2020, hlm 195